

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerja mendapat jaminan kesejahteraan yang meliputi waktu kerja serta mendapat upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sifatnya yang memaksa.

Berbicara mengenai ketenagakerjaan ada pihak-pihak yang terlibat, dalam rangka terselenggaranya hubungan industrial. Pihak-pihak tersebut adalah pekerja, pengusaha dan pemerintah. Upaya menciptakan hubungan industrial adalah dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Bagi pekerja, perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarganya. Bagi pengusaha, perusahaan adalah wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi pemerintah, perusahaan merupakan bagian kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka inilah pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggungjawab atas kelangsungan serta keberhasilan setiap perusahaan. Selain itu, pemerintah mempunyai peranan

sebagai pengayom, pembimbing, pelindung dan pendamai bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi.

Dengan adanya peran pemerintah diharapkan, hubungan industrial yang didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar pihak yang terkait dalam proses produksi akan berjalan dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha, secara yuridis pekerja dipandang sebagai orang yang bebas karena prinsip negara kita tidak seorang pun boleh diperbudak. Secara sosiologis pekerja itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya. Pekerja kadang-kadang terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun memberatkan bagi pekerja itu sendiri. Situasi ini menjadi sulit bagi pekerja karena pada saat ini jumlah pekerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya pekerja seringkali diperas oleh pengusaha dengan upah yang relatif kecil.

Dalam perkembangannya meskipun telah terbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pekerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi masih saja ditemukan permasalahan-permasalahan pekerja terutama mengenai hak pekerja dalam

hubungan industrial. Diantaranya permasalahan perlindungan pekerja yaitu kasus pekerja harian lepas Kapal Isap Produksi (KIP) PT. Timah Tbk pada tanggal 25 Januari 2010 yang berlokasi di Air Kantung, Sungailiat, Bangka. Keberadaan pekerja harian lepas Kapal Isap Produksi (KIP) di PT. Timah Tbk sudah pasti sangat dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, pekerja meminta penjelasan mengenai ketidakjelasan kenaikan gaji, upah lembur, kontrak kerja bagi pekerja harian lepas Kapal Isap Produksi di PT. Timah, Tbk. Meskipun begitu ternyata nasib para pekerja harian lepas selalu kurang mendapatkan perhatian yang layak dari pihak pengusaha. Pernyataan ini didasarkan pada bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, upah pekerja dan tunjangan lain-lain.

Menurut Masud seorang pekerja harian lepas kapal isap produksi (KIP) PT. Timah Tbk menyatakan bahwa:

“Pekerja harian lepas PT. Timah Tbk sejak bulan November 2009 yang lalu tidak mendapat kepastian mengenai kenaikan gaji, uang lembur serta perjanjian kerja yang dipergunakan di PT. Timah Tbk juga menggunakan perjanjian kerja secara lisan sehingga menjadi tidak jelas mengenai berapa lama jangka waktu kontrak kerja berlaku. Kenyataan ini dibuktikan dengan hampir 3 (tiga) tahun bahkan sampai ada 7 (tujuh) tahun bekerja, pekerja tidak pernah teken kontrak. Jika pernah teken kontraknya hanya dilakukan pada tiga bulan pertama”.¹

Perjanjian kerja secara lisan memang tidak menyalahi peraturan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut akan lebih baik bila dibuat secara tertulis sebab selama ini bentuk

¹ www.bangka.com Perlindungan bagi pekerja harian Lepas KIP PT. Timah Tbk, Airkantung, Sungailiat, Bangka diunduh pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 pukul 16.25 WIB.

perjanjian kerja secara lisan telah menempatkan pekerja dalam kondisi yang sangat lemah.

Selain permasalahan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja yang terjadi pekerja harian lepas Kapal Isap Produksi (KIP) PT. Timah Tbk yang berlokasi di Airkantung, Sungailiat, Bangka, kasus ketidakjelasan juga terjadi pada pekerja harian lepas pabrik triplek PT. Erwan Superwood Tbk, Pekanbaru. Pada tanggal 30 November 2010, pekerja harian lepas meminta PT. Erwan Superwood Tbk memberikan status yang jelas pada pekerja harian lepas tersebut, karena sudah bekerja belasan tahun lamanya di perusahaan tersebut. Ketidakjelasan juga terletak pada perjanjian kerja yang berlaku bagi pekerja harian lepas tersebut. Waktu kerja yang berlaku bagi pekerja harian lepas pabrik selama 12 (dua belas) jam dari pagi sampai malam namun tidak dihitung lembur. Selain itu, para pekerja harian lepas di pabrik tersebut tidak diperbolehkan untuk membawa makanan maupun minuman padahal di dalam pabrik tersebut tidak ada yang berjualan makanan ataupun minuman. Waktu istirahat bagi pekerja sangat terbatas. Apabila ada pekerja yang kelelahan kemudian duduk sebentar pada waktu istirahat, pengawas langsung menyiram dengan air dan pekerja harian lepas diperintahkan pulang tanpa dihitung jam kerjanya.

Dari latar belakang masalah diatas, nampak terdapat permasalahan mengenai hak-hak pekerja harian lepas, sehingga permasalahan ini perlu mendapat penyelesaian agar pekerja harian lepas tidak selalu dirugikan, sehingga dalam penelitian ini difokuskan pada: **KAJIAN YURIDIS**

TERHADAP PERLINDUNGAN WAKTU KERJA DAN UPAH BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas telah sesuai peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Ketenagakerjaan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas.
2. Memberikan pemahaman kepada perusahaan atau pemberi kerja akan arti pentingnya perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas.
3. Menghindari perusahaan atau pemberi kerja melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap pekerja harian lepas.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini mengkaji yuridis terhadap perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas.

F. Batasan Konsep

- 1) Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut. Sedang perlindungan itu sendiri adalah hal atau perbuatan melindungi.²
- 2) Waktu kerja menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- 3) Upah menurut Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

“hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan-Balai Pustaka, Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 674.

- 4) Upah secara harian menurut Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.102/MEN/IV/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yaitu

“Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”.

- 5) Pekerja menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- 6) Pekerja harian Lepas menurut Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu

“Pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai data primer sebagai data utama dan data sekunder yang merupakan bahan hukum sebagai data pendukung.

Penelitian dalam penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan cara:

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan hukum sebagai berikut:

(a) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(b) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

(c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dari buku-buku atau literatur yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

b) Penelitian Lapangan

Dalam rangka melengkapi data sebagai bahan pendukung penelitian ini maka dilakukan wawancara langsung yang menggunakan pedoman wawancara berupa tanya-jawab dengan narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan keterangan secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu wawancara langsung dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari segala sumber seperti pendapat hukum berupa buku-buku pendapat hukum, karya ilmiah, artikel, website, hasil penelitian, makalah, hasil wawancara dengan narasumber.

3. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan alasan dan pertimbangan bahwa penulis ingin mengetahui apakah perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

4. Narasumber

Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Sdr. Yohan Paryama selaku Pekerja Harian Lepas PT. Putra Handal Cilacap, yaitu pekerja harian lepas yang bekerja selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut di perusahaan tersebut namun dengan waktu kerja 2 (dua) tahun bekerja belum juga diangkat menjadi pekerja tetap di PT. Putra Handal Tbk, Cilacap.

- b) Sdr. Dani Effendy selaku Pekerja Harian Lepas PT. Sederhana Jaya Cilacap, yaitu pekerja harian lepas yang bekerja selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut di perusahaan tersebut namun dengan waktu kerja 3 (tiga) tahun bekerja belum juga diangkat menjadi pekerja tetap di PT. Sederhana Jaya Tbk, Cilacap.
- c) Bapak Suharyana, Skm., M.Kes selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah yang ada untuk memperoleh gambaran dari pokok permasalahan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin yaitu metode pengambilan data yang dilaksanakan dengan tanya-jawab dengan narasumber dengan pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan peneliti telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Berbagai macam data diperoleh dari studi kepustakaan maupun dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir

yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum ke khusus. Adapun asas yang digunakan adalah:

a. Asas *lex posteriori derogat legi priori*

Asas dimana peraturan yang baru lebih diutamakan daripada peraturan yang lama sepanjang mengatur hal yang sama.

b. Asas *lex specialis derogat legi generali*

Asas dimana peraturan yang khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang umum sepanjang mengatur hal yang sama.

Kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang terjadi dilakukan dengan metode deduktif. Dalam penelitian ini yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian yang bersifat khusus adalah pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai dasar hukum untuk melindungi pekerja harian lepas, kemudian melakukan penilaian positif bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Ketenagakerjaan mengandung berbagai macam nilai, bukan hanya hukum saja tetapi juga nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai persamaan hak, dan kedudukan serta nilai-nilai sosial.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini

dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab II : Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tinjauan tentang pekerja harian lepas, tinjauan tentang waktu kerja, tinjauan tentang upah dan tinjauan tentang kajian yuridis terhadap kasus perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas.

Bab III : Penutup

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran relevan berkaitan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.